

SAMBUTAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik tepat waktu.

Sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



Laporan Kinerja menyajikan target dan capaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung tahun 2022. Target kinerja dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini juga memuat analisis perbandingan antara rencana atau target dengan realisasi kinerja. Pencapaian realisasi kinerja keuangan juga diuraikan dalam sub bab kinerja keuangan. Mulai tahun anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Laporan Kinerja ini kami dedikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai data rujukan. Kepada semua yang sudah berkontribusi dalam laporan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Penajam, Desember 2022
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan Penajam Buluminung

Eko Budi Setiawan, ST
NIP. 19810318 201001 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2022, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Bulumunung (UPT. Pelabuhan) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana dalam Renstra Dinas Perhubungan. Kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2022 diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Bulumunung. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2022 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023.

Perencanaan kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari UPT. Pelabuhan yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Bulumunung. Fungsi UPT. Pelabuhan difokuskan pada upaya pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Bulumunung. Dari *output* pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Bulumunung diharapkan dapat tercapai *outcome* yang tertib, patut, transparansi, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan tahun 2022 terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis (SS) yang terdiri 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Skala capaian kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun 2022 adalah **76,40%** atau kategori **BAIK**.

Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2022 ditinjau dari Sasaran Strategis yaitu terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja jajaran UPT. Pelabuhan, dengan rincian masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Tertib administrasi laporan keuangan: 100%.
2. Peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhanan: Rp. 4.065.001.582,00 (135%)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.3. Organisasi dan Personalia.....	2
1.4. Sumber Keuangan.....	4
1.5. Sarana dan Prasarana.....	4
1.6. Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan.....	4
1.7. Sistematika Penyajian.....	6
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Sasaran Strategis.....	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja.....	8
2.3. Program dan Kegiatan.....	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	11
3.2. Ringkasan Penjelasan Capaian Kinerja.....	14
3.3. Kinerja Keuangan.....	16
BAB 4 PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan.

Laporan Kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kepala UPT. Pelabuhan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DIPA tahun 2022 beserta perubahannya, sebagai tolok ukur keberhasilan UPT. Pelabuhan tahun 2022, sehingga dapat ditemukeni sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja ditahun berikutnya.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sebagai amanat Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, UPT. Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala UPT. yang secara teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dan mempunyai tugas: **Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.**

Dalam melaksanakan tugas, UPT. Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi atas pemberian jasa pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
3. Melaksanakan penyelesaian akhir pelayanan jasa Pelabuhan Penajam Buluminung, setelah pengguna jasa pelabuhan melunasi kewajiban membayar retribusi;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Pelabuhan Penajam Buluminung;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi UPT. Pelabuhan terdiri dari 2 (dua) Eselon IV, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Tugas: memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.

Fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- b. melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan didalam lingkungan pelabuhan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan upaya pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- d. melakukan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan dan sekitarnya;
- e. mengkoordinir pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan keuangan UPT. Pelabuhan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas: menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. dibidang pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.

Fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
- e. penyusunan rencana kegiatan pengendalian;
- f. pelaksanaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
- h. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT. sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur pada Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

- a. Pelaksana urusan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. Pelaksana urusan keuangan;
- c. Pelaksana urusan penyusunan program.



Gambar 1 Struktur Organisasi UPT. Pelabuhan

Sumber: Peraturan Bupati No. 1, 2016

Sampai dengan akhir tahun 2022 UPT. Pelabuhan memiliki pegawai sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai PNS dan non-PNS, yang terdiri dari 14 (empat belas) pegawai laki-laki dan sebanyak 5 (lima) pegawai perempuan, dengan perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai UPT. Pelabuhan Tahun 2022 Berdasarkan Gender

No	Unit Tugas	Laki-Laki		Perempuan		Total	
1	Kepala	1	5,26%	-	-	1	5,26%
2	Sub Bagian Tata Usaha	1	5,26%	-	-	1	5,26%
3	Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksana Urusan Keuangan	-	-	1	5,26%	1	5,26%
5	Pelaksana Urusan Penyusunan Program	-	-	-	-	-	-
6	Fungsional Umum (THL)	12	63,18%	4	21,05%	16	84,21%
Jumlah		14	73,68%	5	26,32%	19	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dalam menjalankan tugasnya, UPT. Pelabuhan didukung oleh pegawai dari berbagai macam latar pendidikan, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai UPT. Pelabuhan Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Tugas	Pendidikan			Jumlah
		S-1/S-2	D-3	SMA/K	
1	Kepala	1	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	1	-	-	1
3	Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-
4	Pelaksana Urusan Keuangan	1	-	-	1

5	Pelaksana Urusan Penyusunan Program	-	-	-	-
6	Fungsional Umum (THL)	3	1	12	16
Jumlah		6	1	12	19

Sumber: Hasil Analisis, 2022

1.4. Sumber Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2022 UPT. Pelabuhan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai rincian berikut:

Tabel 1.3 DIPA Sub Unit UPT. Pelabuhan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	DIPA 2022 (Rp)	P-DIPA 2022 (Rp)
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.912.800,00	124.912.800,00
2	Administrasi Umu Perangkat Daerah	7.270.000,00	7.270.000,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.696.780,00	7.696.780,00
Jumlah		139.879.580,00	139.879.580,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

1.5. Sarana dan Prasarana

Data aset Dinas Perhubungan yang berada dalam pengelolaan UPT. Pelabuhan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data aset Dinas Perhubungan pada UPT. Pelabuhan Tahun 2022

No	Jenis Aset	Ukuran	Kondisi	Keterangan
1	Dry Port (<i>site development</i>)	± 19 Ha	Sedang	Tanah urug, sheetpile, bronjong, pondasi tangki.
2	Causeway	720 M2	Sedang dan Rusak Berat	Berfungsi 1 unit; 1 unit tidak digunakan karena mengalami efek deformasi lateral sheetpile.
3	Bangunan (eks. direksi kit)	60 M2	Sedang	Dipergunakan sebagai gudang sementara
4	Bangunan Pos Jaga	12 M2	Baik	Bangunan baru
5	Bangunan Container Office	2 x 20 ft	Baik	Bangunan baru
6	Laptop	3 Unit	Sedang	Berfungsi
7	Printer	2 Unit	Baik	Berfungsi
8	Genset	1 Unit	Baik	Berfungsi
9	Kendaraan operasional roda 4	1 Unit	Sedang	Berfungsi
10	Kendaraan operasional roda 2	1 Unit	Sedang	Berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

1.6. Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

UPT. Pelabuhan memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan. Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan tidaklah mudah, karena potensi yang ada, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Potensi

Pelabuhan Penajam Bulumunung yang terletak di Kawasan Peruntukan Industri Bulumunung, tepatnya di Kelurahan Gunung Seteleng merupakan satu diantara penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberadaan pelabuhan sangat mendukung pengembangan dan peningkatan komoditi yang dihasilkan oleh wilayah *hinterland* agar dapat diekspor ke luar wilayah bahkan ke luar negeri, dan menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki daya saing di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

2. Isu Strategis

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019-2023 (RPJMD Penajam Paser Utara 2018-2023), maka isu strategis yang berkembang pada pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Bulumunung tahun 2020 ada 4 (empat), yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
- b. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
- c. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan *good governance*.

3. Permasalahan

UPT. Pelabuhan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna layanan (mitra) atas kualitas dan ketersediaan fasilitas Pelabuhan Penajam Bulumunung. Permasalahan Pelabuhan Penajam Bulumunung yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a. Belum optimalnya pencatatan laporan aktifitas bongkar muat;
- b. Belum optimalnya pengaturan lalu lintas angkutan barang di lingkungan pelabuhan;
- c. Belum tersedianya dokumen ANDALALIN Pelabuhan Penajam Bulumunung;
- d. Belum optimalnya pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk ruas jalan akses pelabuhan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan tahap pengembangan penyediaan infrastruktur Pelabuhan Penajam Bulumunung sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Penajam;

- f. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan;
- g. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan pelabuhan;
- h. Belum optimalnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja di pelabuhan;
- i. Belum optimalnya strategi peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas kompetensi SDM pada pengelolaan kepelabuhanan.

1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penyajian Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB 1 PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan tugas dan fungsi, organisasi, keuangan, aset, potensi, isu strategis, dan permasalahan.
2. **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**, menjelaskan rencana serta penetapan kinerja UPT. Pelabuhan tahun anggaran 2022.
3. **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan, kendala, dan rekomendasi Kinerja UPT. Pelabuhan tahun anggaran 2022.
4. **BAB 4 PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT. Pelabuhan selama tahun anggaran 2022 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Pada tingkat Dinas Perhubungan, diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPT. Strategi pencapaiannya diimplementasikan dalam Peta Strategi (*Strategy Map*) Dinas Perhubungan sebagai target kinerja pada tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan, dijabarkan lebih lanjut secara berjenjang kepada seluruh unsur organisasi sampai dengan tingkat individu.

Target Kinerja UPT. Pelabuhan Tahun 2022 tersebut, kemudian dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja kuartalan.

2.1. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh UPT. Pelabuhan secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

Berdasarkan hal tersebut maka disusun sasaran strategis UPT. Pelabuhan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022. Sasaran strategis Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

Kemudian berdasarkan sasaran strategis tersebut disusun peta strategis. Peta strategis adalah sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada tugas dan tanggung jawab UPT. Pelabuhan.



Gambar 2 Peta Strategis UPT. Pelabuhan Tahun 2022

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

2.2. Indikator dan Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala UPT. Pelabuhan ditetapkan target kinerja tahun 2022. Target kinerja ini terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target selama tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan per Kuartal 2022. Berdasarkan hal tersebut berikut disajikan indikator kinerja dan target UPT. Pelabuhan selama tahun 2022.

Tabel 2.1 SS dan IKU UPT. Pelabuhan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Tertib administrasi laporan keuangan	100 %
	2. Peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhanan	Rp. 3.000.000.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

2. Penghitungan Capaian Kinerja

Dalam menghitung capaian realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Menghitung capaian IKU

- 1) Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- 2) Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2.

$$\text{Capaian Final IKU} = \frac{\text{Eviden} + \text{Capaian IKU}}{2}$$

b. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagi terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

- c. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap bobot sasaran per perspektif.

$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per perspektif}}$$

- d. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian Kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspektif} \times \text{Bobot Perspektif}}{\text{Total bobot perspektif}}$$

2.3. Program dan Kegiatan

UPT. Pelabuhan melakukan koordinasi dan pengendalian pada program:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab UPT. Pelabuhan tahun anggaran 2022 didukung dengan rincian anggaran dana sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Pagu Anggaran UPT. Pelabuhan 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
I.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	124.912.800,00
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bln	112.808.000,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Pkt	12.104.800,00
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.270.000,00
	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Pkt	2.480.000,00
	2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	4.790.000,00
III.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.696.780,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Pkt	6.503.080,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Pkt	1.193.700,00
Jumlah				139.879.580,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja UPT. Pelabuhan adalah kinerja keseluruhan pada tahun anggaran 2022. Pengukuran nilai/ angka capaian kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2022 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2022 dengan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Kepala UPT. Pelabuhan.

Laporan Kinerja menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari program dan kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja Sasaran, termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan *Impact* atau dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses penghitungan/ pengukuran kinerja menggunakan dasar dari manual IKU yang telah disusun sebelumnya. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberikan acuan skala pengukuran dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2022

No	Skala Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat baik
2.	75% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Kemendagri, 2010

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun anggaran (TA) 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis (SS) dan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU). Target kinerja tersebut disusun dalam 2 (dua) perspektif yaitu *learning and growth perspektive* (bobot 40), dan *internal bussines process perspektive* (bobot 60).

Secara keseluruhan, capaian kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan baik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan (<i>Learning & Growth</i>)			40 %
	Tertib administrasi laporan keuangan pelayanan jasa pelabuhan	100 %	100 %	100 %
	Perspektif Proses Bisnis Internal (<i>Internal Bussines Process</i>)			60 %

	Peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhanan	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 4.065.001.582,00	135,5 %
Capaian Total		121,30 %		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas kemudian setelah dilakukan penghitungan sesuai bobot, maka nilai capaian kinerja total dan untuk masing-masing perspektif pada setiap kuartal TA. 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Nilai Capaian Kinerja UPT. Pelabuhan per Perspektif TA. 2022

Perspektif	Bobot (%)	Kuartal I (%)	Kuartal II (%)	Kuartal III (%)	Kuartal IV (%)
<i>Learning & Growth</i>	40	10	20	30	40
<i>Internal Bussines Process</i>	60	5,51	28,22	50,88	81,3
		15,51	48,22	80,88	121,30

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pengukuran nilai capaian kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2022 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir kuartal dengan target (rencana kinerja) yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan pada awal tahun anggaran (bulan Januari).

Capaian TA. 2022 ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika capaian kinerja total dibandingkan langsung, maka akan bias penilaiannya. Berikut ini dijelaskan masing-masing capaian atau progres kinerja pada kuartal TA. 2022:

a. *Learning and Growth Perspektive*

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau *learning and growth perspektive* pada TA. 2022 mempunyai bobot 40% dari target capaian total, yang terdiri dari 1 (satu) SS dan 1 (satu) IKU yaitu:

1) Sasaran Strategis (SS)

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sasaran yang dimaksud adalah terlaksananya peningkatan penerimaan pendapatan dari retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan pada UPT. Pelabuhan Penajam Bolumunung dengan sistem pelaporan keuangan yang tertib dan pertumbuhan jenis pelayanan.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tertib administrasi laporan keuangan

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur kualitas administrasi bidang keuangan retribusi daerah yang dilaksanakan di UPT. Pelabuhan. Kualitas administrasi keuangan yang dimaksud adalah tertib administrasi laporan keuangan penerimaan pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan

Tabel 3.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama 1

IKU	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian
Tertib administrasi laporan keuangan	40	100%	100%	40%
				40%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

b. Internal Bussines Process Perspective

Perspektif proses bisnis internal atau *internal bussines process perspective* pada TA. 2022 mempunyai bobot 60% dari target capaian total, yang terdiri dari 1 (satu) SS dan 1 (satu) IKU yaitu:

1) **Sasaran Strategis (SS)**

Sasaran strategis sebagaimana disebut pada huruf a.

2) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhan

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi penerimaan pendapatan dari retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan melalui peningkatan kualitas laporan dan kuantitas jasa pelayanan

Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama 2

IKU	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhan	60	Rp. 3M	Rp. 4,065 M	81,30%
				81,30%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.2. Ringkasan Penjelasan Capaian Kinerja

a. Analisa Ringkas Capaian Kinerja

Secara umum jika didasarkan pada target kinerja TA. 2022, maka capaian kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun 2022 dapat dianggap **SANGAT BAIK** karena tercapai lebih dari **100%**. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 ini menetapkan target untuk kegiatan atau kinerja yang dihasilkan oleh UPT. Pelabuhan yaitu Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan; dan Jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2022 ini adalah:

- 1) Penetapan kinerja yang terukur dan sesuai dengan kemampuan sumber daya;
- 2) Ketersediaan anggaran yang memadai;
- 3) Dukungan atau fasilitasi dari semua unsur, terutama dalam hal penyediaan prasarana, pengajuan produk hukum daerah, dan proses administrasi;
- 4) Meningkatnya pemahaman pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan pada bidang tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja UPT. Pelabuhan;
- 5) Kemampuan pegawai UPT. Pelabuhan dalam menjalankan program koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja organisasi yaitu target kinerja yang ditetapkan tidak sebanding dengan sumber daya yang ada (terutama jumlah staf pelaksana). Sampai dengan tahun 2022, staf pelaksana masih didominasi oleh pegawai/ tenaga kontrak. Sementara itu staf PNS juga belum mencukupi (sesuai dengan kebutuhan). Staf pelaksana baru terpenuhi 5% dari kebutuhan. Untuk itu **direkomendasikan** agar unit kerja yang membidangi kepegawaian untuk melakukan pengajuan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dan tugas jabatan urusan kepelabuhanan dan retribusi daerah.

b. Capaian Kinerja Strategis

Selain capaian kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target dalam Renstra/ PK, UPT. Pelabuhan juga telah berhasil menghasilkan beberapa capaian strategis, diantaranya yaitu:

- 1) Berperan aktif dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Nantinya regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang tertib administrasi dan profesional;
- 2) Berperan aktif dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 3) Berperan aktif dalam mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) yang baru tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Pembentukan peraturan daerah tersebut melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022 yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten.
- 4) Fasilitasi rencana pengembangan prasarana pelabuhan sisi darat (*dryport*) melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada tahun 2022 UPT. Pelabuhan masih kekurangan pegawai, terutama staf pelaksana urusan administrasi umum dan kepegawaian, staf pelaksana urusan penyusunan program, staf pelaksana urusan pelabuhan, serta staf pelaksana urusan teknis yang memahami dasar-dasar keilmuan yang menunjang kegiatan kepelabuhanan.

Komposisi jumlah sumber daya manusia di UPT. Pelabuhan sampai dengan akhir tahun 2022, berbeda sedikit dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Jumlah seluruh pegawai sebanyak 19 orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS 3 orang, serta pegawai non-PNS 16 orang. Untuk jabatan fungsional/ pelaksana masih kekurangan 19 pegawai (ASN/ PNS).

Adapun keragaman pegawai UPT. Pelabuhan berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Jumlah Kondisi Pegawai UPT. Pelabuhan 2022

No	Jabatan/ Eselon	Kebutuhan	Jumlah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Terpenuhi (%)
1	Jabatan Pengawas	2	2	-	100
2	Staf Pelaksana/ Fungsional	21	1	20	4,76
3	Non PNS	20	16	4	80
Jumlah PNS/Non PNS		43	19	20	44,19%

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2020

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa UPT. Pelabuhan masih terdapat kekurangan staf pelaksana/ fungsional (PNS) sebanyak 20 orang. Sebagai antisipasi kekurangan staf pelaksana/ fungsional, telah diangkat staf kontrak/ THL/ non PNS sebanyak 16 orang dengan penugasan sebagai pengawas pelabuhan. Rincian jabatan yang belum terisi sebagai berikut:

Pelaksana/ Fungsional	:	a. Analis Tata Usaha	1 orang
		b. Analis Rencana Program dan Kegiatan	1 orang
		c. Analis Manajemen Lintas	1 orang
		d. Analis Pelabuhan	1 orang
		e. Pengawas Pelabuhan	4 orang
		f. Operator Jembatan Timbang	2 orang
		g. Pemeriksa Pelabuhan	2 orang
		h. Penagih Retribusi	2 orang
		i. Pengadministrasi Karcis	2 orang
		j. Pengelola Pemeriksa Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	2 orang
		k. Teknisi Sarana dan Prasarana Pelabuhan	2 orang
		l. Pengawas Fasilitas dan Perawatan Peralatan Pelabuhan	1 orang

3.3. Kinerja Keuangan

a. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran UPT. Pelabuhan TA. 2022 dengan besar Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 139.879.580,00. Dari sisi realisasi, UPT. Pelabuhan memiliki tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,791% atau senilai Rp. 136.782.237,00.

Kebijakan dan isu yang ditangani UPT. Pelabuhan disaat pelaksanaan APBD II TA. 2022 sering kali tidak sama dengan saat APBD II disusun pada tahun 2021. Untuk mengatasi hal ini maka disediakan mekanisme revisi anggaran yang berfungsi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan dan kegiatan pada APBD II TA. 2022. Hingga akhir tahun 2022, berikut realisasi anggaran pada UPT. Pelabuhan:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran UPT. Pelabuhan TA. 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			139.879.580	136.782.237	97,79
I.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah	124.912.800	125.635.307	100,58

		Daerah			
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	7.270.000	6.870.000	94,50
III.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7.696.780	4.276.930	55,57

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2022

b. Realisasi Pendapatan

Selain realisasi anggaran tersebut diatas, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian pendapatan dari retribusi jasa kepelabuhanan dan kepatutan pelaksanaan Perda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pencapaian pendapatan retribusi

Pencapaian pada sektor ini adalah sebesar 91,09% dari 100% target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan UPT. Pelabuhan TA. 2020

Jenis Pendapatan	Jenis Pelayanan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Pas bulanan kendaraan bermotor	3.000.000.000	4.065.001.582	135,50
	Penumpukan barang curah kering			
	Penumpukan barang curah basah			
	Pelayanan tambahan			

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2022

2) Kepatutan administrasi retribusi

Pencapaian pada sektor ini adalah sebesar 135,50% dari 100% target yang telah ditetapkan. Perhitungan tersebut didapatkan dari hasil perhitungan realisasi capaian dan target yang telah ditetapkan, dimana dari SKRD yang diterbitkan senilai Rp. 5.003.404.730,00 telah dilunasi senilai Rp. 4.032.031.582,00 dan retribusi terutang senilai Rp. 556.251.574,00.

Tabel 3.10 Administrasi Pelayanan UPT. Pelabuhan TA. 2022

Jenis Administrasi	Ketetapan Retribusi (Rp)	Pendapatan		
		Lunas (Rp)	Terutang (Rp)	Capaian (%)
SKRD/ SSRD	5.003.404.730	4.032.031.582	556.251.574	80,59

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2022

BAB 4

PENUTUP

UPT. Pelabuhan memiliki tugas utama yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung, direalisasikan dalam sasaran strategis. Pada TA. 2022 dapat disimpulkan nilai capaian kinerja UPT. Pelabuhan Penajam adalah 121,30%. Anggaran yang terealisasi sebesar 97,79% dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 135,50%.

Dalam rangka peningkatan atau perbaikan capaian (kualitas dan kuantitas) kinerja, telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Penajaman proses perencanaan kerja dan target kinerja dengan memperhatikan RPJMD Penajam Paser Utara 2018-2023;
- b. Usulan penambahan jumlah pegawai, baik dari CPNS maupun rekrutmen dari instansi lain;
- c. Penataan kembali pola manajemen dalam lingkungan UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung sehingga tugas administrasi dan keuangan pengelolaan pelabuhan terlaksanan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi;
- d. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian target kinerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengembangkan manajemen kearsipan dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan data perkantoran sehingga dapat tersimpan dengan baik, rapi dan teratur;
- b. Melaksanakan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan kompetensi pegawai;
- c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan, terutama di level pimpinan, akan perlunya penyusunan rencana kerja/ kegiatan dan kinerja yang terukur (dapat dicapai dan dihitung capaiannya);
- d. Penambahan anggaran untuk penyediaan prasarana pendukung pengelolaan layanan kepelabuhanan;
- e. Usulan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kualifikasi sejumlah 12 orang, dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan penyelenggara layanan kepelabuhan dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun berikutnya. Sehingga tujuan akhirnya adalah pendapatan asli daerah yang terus meningkat dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.